

**PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin)**

Ahmad Irfansyah
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : irfansyahahmad2@gmail.com

Jumania Septariani
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : [jsseptariani@gmail.com](mailto:jseptariani@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Property Administration on the Quality of Financial Reports of the Secretariat of DPRD Musi Banyuasin Regency. Data collection techniques used in this study were questionnaires. The population of this research was the secretariat employees of DPRD Musi Banyuasin Regency, the sample used were 30 respondents using purposive sampling method. This research was a quantitative research with simple linear regression analysis. The administration of regional property on the quality of financial reports was tested using hypothesis testing, namely the correlation test, the coefficient of determination and the partial test using SPSS software. Before testing the hypothesis, the data was first tested using the data quality test. The results showed that the coefficient of determination obtained was 90.2%, the variation in the Quality of Regional Apparatus Financial Reports variables could be explained by the Regional Property Administration variable, while the remaining 9.8% was explained by other variables not analyzed in this study. The test results partially show that the Administration of Regional Property has a significant effect on the Quality of Regional Financial Reports.

Keywords: *Accountability, Transparency, Performance-Based Budgeting, performance concept, Principles of Performance-Based Budgeting*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik negara/daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengamanan barang milik negara/daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen instansi pemerintahan didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah. Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan Barang Milik Daerah ini nantinya dapat digunakan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan administrasi Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pengamatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah antara lain, adanya beberapa kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang belum dikembalikan oleh pensiunan pegawai yang pernah bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang kegiatan operasional di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin serta menyebabkan resiko terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah. Pada laporan keuangan tidak dijelaskan secara rinci terhadap aset yang masih dikuasai oleh mantan PNS yang dimutasi sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dan keterbukaan agar dapat memberikan gambaran tentang barang milik daerah yang ada, adanya kejelasan status kepemilikan dan pengamanan barang daerah. Selain itu masih ada kelemahan pada sistem pengendalian intern, masih terdapat beberapa aset ruangan yang belum mempunyai nomor identitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang masih belum baik. Hasil observasi yang telah dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kesalahan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah ini dapat menyebabkan laporan Barang Milik Daerah disajikan tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin).

LANDASAN TEORI

Barang Milik Negara/Daerah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Tahun 2010 Nomor 07 Paragraf 5, aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Tahun 2010 Nomor 07 dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Pengertian barang milik negara/daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud maupun tidak berwujud yang tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang dihasilkan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

Penatausahaan barang milik daerah dalam mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah yang dimaksud mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kegiatan penatausahaan ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Pelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan serta Kualitas Laporan Keuangan dalam Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan pemakai laporan keuangan. Dalam PSAP 1 tentang tujuan penyajian laporan keuangan adalah diharapkan memberikan manfaat bagi pemakai untuk membuat keputusan agar bermanfaat. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki,

Penatausahaan barang milik daerah merupakan fungsi yang sangat strategis. Inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang saat ini. Dengan langkah inventarisasi barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud *database* barang milik daerah yang akurat dan *reliable* sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara. Implementasi dari sistem inventarisasi dan pelaporan

yang baik akan berdampak baik untuk keberhasilan pengamanan barang milik daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh baik tidaknya penatausahaan aset tetap atau barang milik daerahnya. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan merupakan proses dalam penatausahaan barang milik daerah. Meningkatnya sistem penatausahaan terhadap barang milik daerah tersebut, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih *reliable* mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang sebenarnya dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian, perlu adanya objek penelitian, begitu juga dengan penelitian ini. Objek Penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang berlokasi di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu Hubungan yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan variabel terikat (Y). Desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam desain ini, umumnya hubungan sebab akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara dan variabel terikat. Pengujian terhadap hubungan sebab akibat antar variabel yang banyak diterapkan adalah teknik-teknik statistik inferensial.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban dari daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Penulis juga menggunakan data pendukung berupa dokumen lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan Penulis berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan Penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, terutama di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin). Penulis juga melakukan wawancara berstruktur dimana Penulis bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Penulis juga mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut Penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan yang relevan.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait. Operasionalisas Variabel pada penelitian ini yaitu Variabel Independen dan Variabel Dependen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang dihasilkan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Penatausahaan adalah dengan menggunakan kuesioner. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi target populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 197 pegawai yang terdiri dari 57 PNS dan 140 Tenaga Honorer. 57 PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 4 Kepala Bagian, 12 Sub Koordinator Pejabat Fungsional dan 40 Pejabat Fungsional. Adapun 140 Tenaga Honorer terdiri dari 30 Operator Komputer, 12 Tenaga Supir, 23 Petugas Keamanan, 25 Tenaga Kebersihan, 8 Tenaga Teknisi, 8 Pengelola Informasi Publik, 4 Tenaga Pramus Saji Rumah Pimpinan DPRD, 5 Tenaga Pemeliharaan Lampu, Listrik, dan Genset dan 37 Tenaga Pramus Tamu. Jadi dari 197 pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri dari 19 PNS dan 11 Tenaga Honorer.

Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pengguna Barang, Kepala Bagian, Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Operator Simda Barang, Operator Simda Keuangan dan memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada periode penyusunan laporan barang milik daerah dan laporan keuangan. Alasan pemilihan responden adalah karena pengguna barang adalah pejabat yang menggunakan anggaran sesuai dengan penguasaannya dan bertanggung jawab untuk mengelola barang milik daerah sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan barang milik daerah, salah satu tugas kepala bagian adalah memberikan kebutuhan apa yang diperlukan dari bagian sehingga akan memberikan informasi mengenai apakah perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dilakukan sesuai atau optimal, salah satu tugas sub koordinator perencanaan dan penganggaran adalah membahas rencana kebutuhan yang dilakukan oleh pengurus barang untuk kemudian ditetapkan apakah barang tersebut layak untuk diadakan sehingga akan mendukung pengumpulan informasi mengenai perencanaan kebutuhan, sub koordinator

akuntansi dan pelaporan adalah salah satunya untuk membandingkan kebutuhan yang direncanakan tersebut dengan kondisi keuangan sehingga akan memberikan informasi mengenai apakah sumberdaya finansial tersedia atau tidak, operator barang dan operator simda keuangan bertanggung jawab dalam pembuatan laporan barang milik daerah dan laporan keuangan dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan barang milik daerah dan laporan keuangan. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*representative*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputasi program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), dengan Metode Regresi Sederhana. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif .

Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan *valid* dan *reliable* sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam hal ini digunakan beberapa butir pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Menurut Priyatno (2018:17), uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5 persen dari *degree of freedom* (df)

= $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $> r$ tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung $< r$ tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Untuk pengambilan keputusan uji reabilitas bisa menggunakan batasan 0,6, menurut Sekaran dalam Priyatno (2018: 25), reabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan Umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel response atau variabel akibat (Dependen).

X = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independen).

a = Konstanta.

b = Koefisien garis regresi.

Uji Korelasi (r)

Sugiyono (2015: 78) menyatakan korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Fungsi utama dari uji korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran yang menyatakan keeratan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau sering disebut dengan korelasi person (*pearson product moment*). Rumus koefisien korelasi r Pearson adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

dimana :

r = korelasi pearson

n = banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = jumlah pengamatan variabel X

$\sum y$ = jumlah pengamatan variabel Y

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 1
Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kriteria
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2015)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: $KD = r^2 \times 100\%$

Uji Signifikasi Pengaruh t (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat melalui uji regresi dengan menggunakan SPSS yaitu apabila p-value (sig) lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu pengujian uji t juga dapat dilihat melalui ketentuan berikut ini:

1. Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung $<$ nilai t tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data dan Pembahasan Statistik Deskriptif (Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas)

Berdasarkan uji validitas variabel penatausahaan barang milik daerah diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid. Alternatif ketentuan validitas suatu pertanyaan pada kuesioner juga dapat dibandingkan dengan nilai r tabel. Diketahui jumlah responden yang dilibatkan untuk uji validitas kuesioner sebanyak $n=30$, sehingga derajat bebas (*degree of freedom*) bernilai $n=30-2=28$. Nilai r tabel dengan derajat bebas 28 pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi adalah 0,3610. Berdasarkan uji validitas variabel kualitas laporan keuangan diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid. Alternatif ketentuan validitas suatu pertanyaan pada kuesioner juga dapat dibandingkan dengan nilai r tabel. Diketahui jumlah responden yang dilibatkan untuk uji validitas kuesioner sebanyak $n=30$, sehingga derajat bebas (*degree of freedom*) bernilai $n=30-2=28$. Nilai r tabel dengan derajat bebas 28 pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi adalah 0,3610. Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan variabel penatausahaan barang milik daerah dan

variable kualitas laporan keuangan dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2
 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,772
Kualitas Laporan Keuangan	0,797

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi sederhana dengan program SPSS versi 26.00 diperoleh hasil seperti Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
 Hasil Regresi Sederhana
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1,293	2,394		,540	,593
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	,866	,054	,950	16,073	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi sederhana adalah:

$$Y = 1,293 + 0,866X$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 1,293 artinya jika penatausahaan barang milik daerah (x) konstan (nol), maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 1,293.
2. Variabel penatausahaan barang milik daerah mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan positif dan searah antara variabel penatausahaan barang milik daerah (X) dengan variabel kualitas laporan keuangan (Y).
3. Koefisien penatausahaan barang milik daerah memberikan nilai sebesar 0,866 yang berarti bahwa jika variabel penatausahaan barang milik daerah bertambah satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,866.

Uji Korelasi (r)

Ukuran yang menyatakan keeratan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau sering disebut dengan korelasi person (*pearson product moment*). Hasil pengujian korelasi disajikan pada Tabel 4

Tabel 4
Uji Korelasi (r)
Correlations

			Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)
Barang (BMD)	Penatausahaan Milik Daerah	Pearson Correlation	1	,950**
		Sig. (2-tailed)		,000
		N	30	30
Laporan Perangkat (LKPD)	Kualitas Keuangan Daerah	Pearson Correlation	,950**	1
		Sig. (2-tailed)	,000	
		N	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diperoleh angka r untuk variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Karena nilai R berada diantara 0,80 sampai dengan 1,000 dengan intepretasi koefisien kolerasi sangat kuat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary

odel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,950 ^a	,902	,899	2,441

a. Predictors: (Constant), Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 5 nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui bahwa koefisien determinasi R^2 yang diperoleh sebesar 0,902. Hal ini berarti 90,2% variasi variabel Kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel penatausahaan barang milik daerah sedangkan sisanya sebesar 9,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji Signifikasi Pengaruh (Uji t)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan uji t. Hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.
(Constant)	,293	2,394			,540	,593
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	,866	,054	,950		6,073	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa uji t hitung sebesar 16,073 untuk variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) dengan menggunakan uji t hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). Untuk mengetahui nilai t tabel, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut: $df = n - k - 1$, di mana n merupakan total sampel, k merupakan jumlah variabel independen. Jadi $df = 30 - 1 - 1 = 28$. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 28 yaitu sebesar 2.04841. Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni $16,073 > 2.04841$ untuk variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Implementasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis di atas, nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui bahwa koefisien determinasi R^2 yang diperoleh sebesar 0,902. Hal ini berarti 90,2% variasi variabel Kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel penatausahaan barang milik daerah sedangkan sisanya sebesar 9,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)

Berdasarkan hasil uji t Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada variabel penatausahaan BMD, t hitung = 16,073 > t tabel = 2.04841 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai

koefisien regresi sebesar 0,866 dan bernilai positif menunjukkan jika pelaksanaan penatausahaan BMD semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penatausahaan/pencatatan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya *database* yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta akan menghasilkan laporan aset dineraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Neraca yang merupakan bagian dari komponen laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian.

Adanya alur penatausahaan yang sistematis, tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut. Selain itu, BPK selaku auditor lebih mudah menelusuri aset dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi sehingga BPK tidak akan ragu dalam menilai tingkat kewajaran keberadaan aset baik secara administrasi ataupun secara fisik. Hal ini mengkonfirmasi asumsi filosofis dari teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa seorang individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal entitas/instansi. Dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya dalam proses penatausahaan BMD harus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi R^2 yang diperoleh sebesar 0,902. Hal ini berarti 90,2% variasi variabel Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) dapat dijelaskan oleh variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sedangkan sisanya sebesar 9,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat bahwa nilai t hitung $>$ dari nilai t

tabel, yakni $16,073 > 2.04841$ untuk variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). Dalam penelitian ini Penulis hanya melakukan pengujian pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengelola barang milik daerah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan analisis kebutuhan dan skala prioritas pemeliharaan barang milik daerah sebelum melakukan perencanaan barang milik daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya melakukan kegiatan inventarisasi aset secara komprehensif mulai dari bidang untuk mendapatkan data barang/aset yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta nilai aset yang akurat (*up to date*), lebih meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah serta perlu adanya regulasi khusus tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) seperti pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Efrizal Syofyan. 2016. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik Vol 4 No.1*.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurfitriyani, Ely. 2018. Pengaruh Penatusahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik Vol 10 No.1*.

Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Priyatno, Duwi 2018, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2016. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Medpress.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Yulpi Poae, dkk. 2017. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. Vol 8 No. 1.